

ABSTRAK

Marta Wijaya, (2008/05932): Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (2) Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (3) Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (4) Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, (5) Pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, modal manusia, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu kombinasi 16 dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2009, dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effects (FEM)*. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Multikolinearitas. (2) Uji Heterokedastisitas. (3) Uji Autokorelasi. (4) Analisis regresi panel. (5) Uji T. (6) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,002 < \alpha = 0,05$) dengan besar pengaruhnya $-0,004$ persen. (2) Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,003 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar $0,002$ persen. (3) Modal manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar $0,008$ persen. (4) Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,004 < \alpha = 0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar $0,152$ persen. (5) Desentralisasi fiskal, Investasi, Modal manusia dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ($\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$). Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar $99,5$ persen.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggali sumber-sumber penerimaan daerah tanpa merusak tataran ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengalokasikan belanja daerah yang pro kepada kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (*good governance*), dengan cara melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si, Bapak Joan Marta, SE, M.Si dan Bapak DR. H. Hasdi Aimon, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta beserta Kakak dan Adik yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2008.
9. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, April 2012

Penulis

Marta Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II. KAJIAN TEORI KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	18
1. Pertumbuhan Ekonomi	18
2. Desentralisasi fiskal	26
3. Desentralisasi Fiskal di Indonesia	30
4. Pengaruh Desentralisasi fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	36
B. Temuan Penelitian Sejenis.....	47
C. Kerangka Konseptual	53
D. Hipotesis	54
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik dan Pengumpulan Data	57
E. Variabel Penelitian	58
F. Defenisi Operasional	58
G. Teknik Analisis Data	59
1. Analisis Deskriptif.....	60
2. Analisis Induktif	60
a. Uji Asumsi Klasik	60
1) Uji Multikolinearitas	60
2) Uji Heterokedastisitas.....	61
3) Uji Autokorelasi	62
b. Model Regresi Panel (<i>Pooled Analysis</i>).....	64

c. Koefisien Determinan (R^2)	69
d. Pengujian Hipotesis	70
1) Uji T.....	70
2) Uji F.....	71

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	73
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	73
a. Letak Geografis Sumatera Barat.....	73
b. Iklim	74
c. Penduduk	75
d. Ketenagakerjaan	76
e. Pendidikan	76
2. Deskripsi Variabel Penelitian	76
a. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi 16 dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat	77
b. Deskripsi Desentralisasi Fiskal.....	80
3. Analisis Induktif	87
a. Uji Asumsi Klasik	87
1) Uji Multikolinearitas	87
2) Uji Heterokedastisitas.....	88
3) Uji Autokorelasi	90
b. Analisis Model Regresi Panel.....	91
1) Chows-Test (Likelihood Ratio Test)	91
2) Uji Hausman	91
3) Analisis Model Regresi Panel.....	92
c. Koefisien Determinan (R^2)	96
d. Pengujian Hipotesis	97
1) Uji T.....	97
2) Uji F.....	99
B. Pembahasan	100
1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat	100
2. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	113
3. Pengaruh Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	114
4. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	116
5. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Modal Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	117

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	48
2. Klasifikasi Nilai d (D-W)	63
3. Hasil Uji Multikolinearitas	87
4. Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas.....	89
5. Hasil Uji Autokorelasi	90
6. Hasil Uji Chows Test.....	91
7. Hasil Uji Hausman.....	92
8. Hasil Estimasi Regresi Panel.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Jutaan Rupiah)	6
2. Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Miliar Rupiah)	9
3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Miliaran Rupiah).....	10
4. Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2007-2009 (Persen)	11
5. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wanger.....	40
6. Kerangka Konseptual Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat	54
7. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Jutaan Rupiah)	78
8. Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Miliar Rupiah)	81
9. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Miliaran Rupiah).....	82
10. Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2007-2009 (Persen)	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Mentah.....	127
Data Diolah.....	129
2. Hasil Uji Multikolinearitas	131
Hasil Uji Heterokedastisitas	135
Hasil Uji Regresi Panel.....	136
3. Tabel Durbin-Watson (DW)	137
Tabel T.....	138
Tabel F.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah, muara dari diterapkan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut belum mampu memunculkan harapan dan keinginan dengan diterapkan desentralisasi fiskal.

Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda dari setiap daerah. Sebagian besar daerah di berbagai wilayah di Indonesia ternyata tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, walaupun ada beberapa daerah yang berhasil dalam pencapaian tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut.

Desentralisasi merupakan suatu tuntutan reformasi yaitu adanya keadilan dalam bidang politik dan ekonomi bagi masyarakat daerah. Keadilan yang masih di rasa kurang ini dianggap sebagai penyebab munculnya rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat. Allen (dalam Kuncoro, 2004:3) menyatakan bahwa, sejarah perekonomian telah mencatat desentralisasi telah muncul

sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidak pastian yang tidak dapat dengan penuh dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Semenjak pemerintahan orde baru berakhir, maka isu dan tuntutan tentang perimbangan wewenang pemerintah pusat dan daerah sangat deras mengalir, dan akhirnya UU No. 5 Tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Semenjak dilaksanakannya undang-undang ini banyak perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 juga memberikan perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari bentuk sentralistis menjadi desentralistis, dalam arti adanya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 22 Tahun 1999) tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 25 Tahun 1999) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Basis desentralisasi di Indonesia adalah kabupaten/kota, dengan tiga

dasar pertimbangan, yaitu: dimensi politik, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme ke daerahan, sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis minim, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif, dan yang terakhir adalah karena kabupaten/kota adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang mengetahui kebutuhan masyarakat serta potensi daerahnya, Kuncoro (2004:3).

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, ada perbedaan pendapat masing-masing akademisi, ekonom dan pengamat kebijakan publik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap desentralisasi fiskal, apakah desentralisasi fiskal mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya dengan kewenangan yang besar diberikan kepada pemerintah daerah malah menimbulkan *research gap* dan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Argument dan pandangan ini telah dibuktikannya secara empiris, hasil studi dari beberapa ahli seperti Davoodi dan Zou (1998) serta Woller dan Phillips (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Lebih jauh, Zhang dan Zou (1998) serta Xie, et all (1999) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang menguntungkan bagi pembangunan, dalam Vazques dan McNab (2001:9). Sebaliknya, hasil studi Thessen (2003), Iimi (2005) dan Malik dkk (2006), Wibowo (2008) George W. Hammond dkk

(2009) menunjukkan hasil berbeda, bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan pandangan dan riset ini, Wibowo (2008:57) menyimpulkan pendapatnya, menurutnya potensi kontribusi desentralisasi fiskal terhadap laju pembangunan akan bergantung kepada ruang dan waktu, artinya dampak positif desentralisasi fiskal yang terjadi di suatu negara atau daerah dalam periode tertentu belum bisa dijadikan tolak ukur bahwa transfer keuangan publik antar pemerintah akan memberikan imbas positif pula di daerah lain pada waktu yang sama.

Era baru otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001, dengan ditandai proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan Depkeu dari RAPBN 2009 dan RAPBN 2011. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa dana perimbangan berjumlah Rp 81,1 triliun, dan meningkat sebesar 16,8 persen di tahun 2002 menjadi Rp 94,7 triliun. Tahun 2006 dana perimbangan mencapai 222,2 triliun atau meningkat sebesar 55,2 persen dari tahun sebelumnya, tahun 2008, besar dana perimbangan Rp 278,7 triliun dan tahun 2011 dana perimbangan yang di transfer ke daerah sudah mencapai Rp 329,1 triliun. Sebagian besar dana perimbangan yang ditransferkan kepada pemerintah daerah adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besarnya transfer ke daerah di ikuti dengan maraknya pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru), baik dari tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Jika

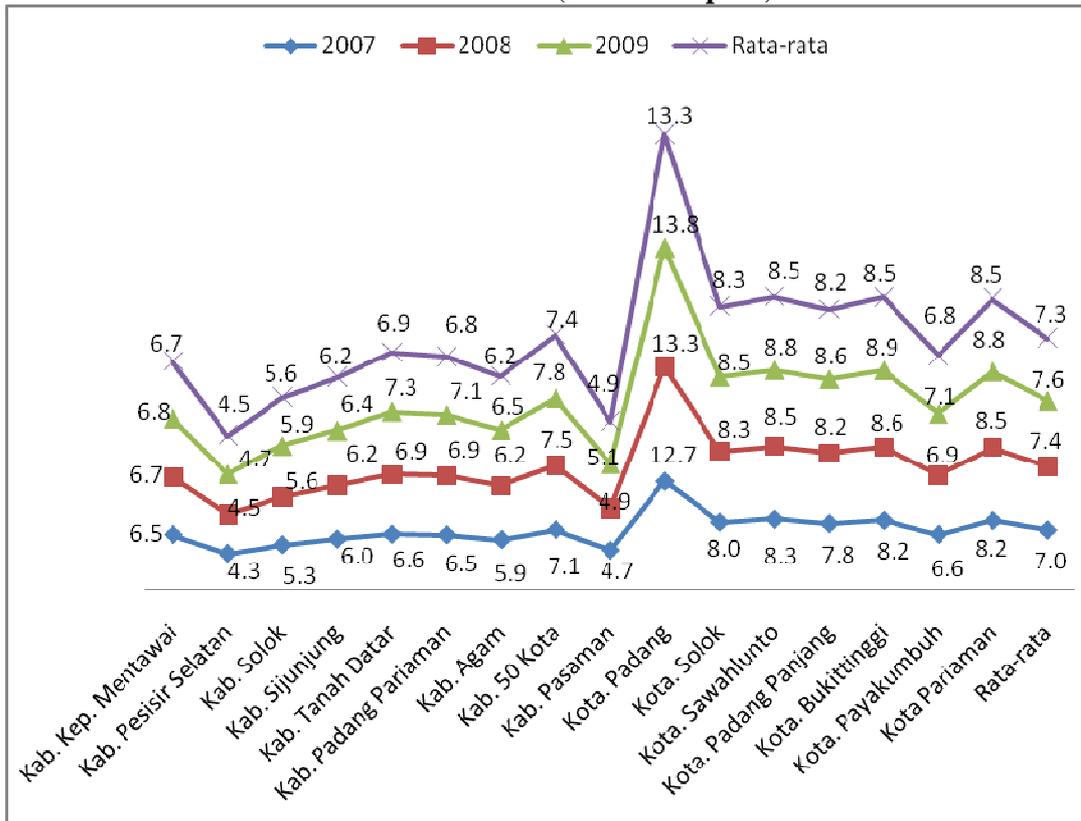
pada tahun 1998 jumlah propinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 propinsi, maka pada tahun 2006 bertambah menjadi 33 propinsi atau meningkat 22,2 persen. Begitu juga daerah kabupaten yang hanya berjumlah 274 pada tahun 1999, di tahun 2006 mencapai 348 kabupaten atau meningkat 27 persen, sedangkan kota semula 70 menjadi 86 di tahun 2006, tahun 2008 jumlah kabupaten/kota mencapai 483 daerah, pada tahun 2011 jumlah kabupaten/kota telah mencapai 491, dengan rincian 398 Kabupaten dan 93 Kota berdasarkan laporan Depertemen Dalam Negeri.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara Nasional, DOB di Propinsi Sumatera Barat juga terjadi secara signifikan. Hal ini terlihat pada munculnya daerah otonom baru dari hasil pemekaran kabupaten/kota induk di Sumatera Barat, terjadi pemekaran wilayah baru kabupaten/kota di Sumatera Barat sebanyak 4 kabupaten dan 1 kota. Hal ini menyebabkan jumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat pada saat ini berjumlah 19 kabupaten/kota, dengan rincian 12 kabupaten dan 7 kota.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat lebih dinominasi pada sektor pertanian. Dimana melihat indikator perkembangan ekonomi di Sumatera Barat dapat di cermati dari perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota, sektor pertanian yang mendominasi pendapatan masyarakat di daerah-daerah di Sumatera Barat masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari proses dan penggunaan sumber daya dalam kegiatan produksi. Kemudian dilihat dari infrstruktur baik dari sektor publik seperti jalan, jembatan,

irigasi pertanian masih mendominasi masalah dan hambatan.

Gambar 1
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2007-2009 (Jutaan Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah 2012)

Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat tiap tahunnya cukup stabil, yang mana hampir seluruh dari kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat memperlihatkan peningkatan ekonomi berdasarkan PDRB Perkapita dari tahun 2007-2009 dengan rata-rata PDRB Perkapita Rp 7,3 juta. Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan Kota Padang merupakan daerah yang memiliki nilai

PDRB Perkapita yang tertinggi dengan rata-rata PDRB Perkapita Rp 13,3 juta, hal ini kemungkinan disebabkan Kota Padang merupakan ibu Kota Propinsi di Sumatera Barat. Dimana hampir dari pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan jasa dilakukan di Kota Padang, sehingga sumber-sumber pendapatan masyarakat lebih heterogen dan memiliki daya beli yang lebih baik, dan diikuti oleh Kota Sawahlunto dan Kota Bukittinggi dengan rata-rata perkembangan PDRB Perkapita Rp 8,5 juta untuk Kota Sawahlunto dan Rp 8,5 juta untuk Kota Bukittinggi. Apabila dilihat dari struktur ekonomi kedua daerah ini, Kota Sawahlunto merupakan daerah yang memiliki PDRB Perkapita yang lebih baik. Hal ini kemungkinan sumber utama yang mendominasi PDRB Perkapita ini lebih kesektor pertambangan atau industri. Kota Bukittinggi didominasi pada sektor jasa seperti perhotelan, dan pariwisata.

Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman merupakan daerah yang memiliki PDRB Perkapita yang rendah, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat dengan rata-rata PDRB Perkapita Rp 4,5 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Rp 4,9 juta untuk Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah maritim dan agraris, dan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di daerah ini. Sedangkan Kabupaten Pasaman apabila dilihat dari sumber utama pendapatan masyarakat hanya didominasi sebagai buruh tani dan perkebunan.

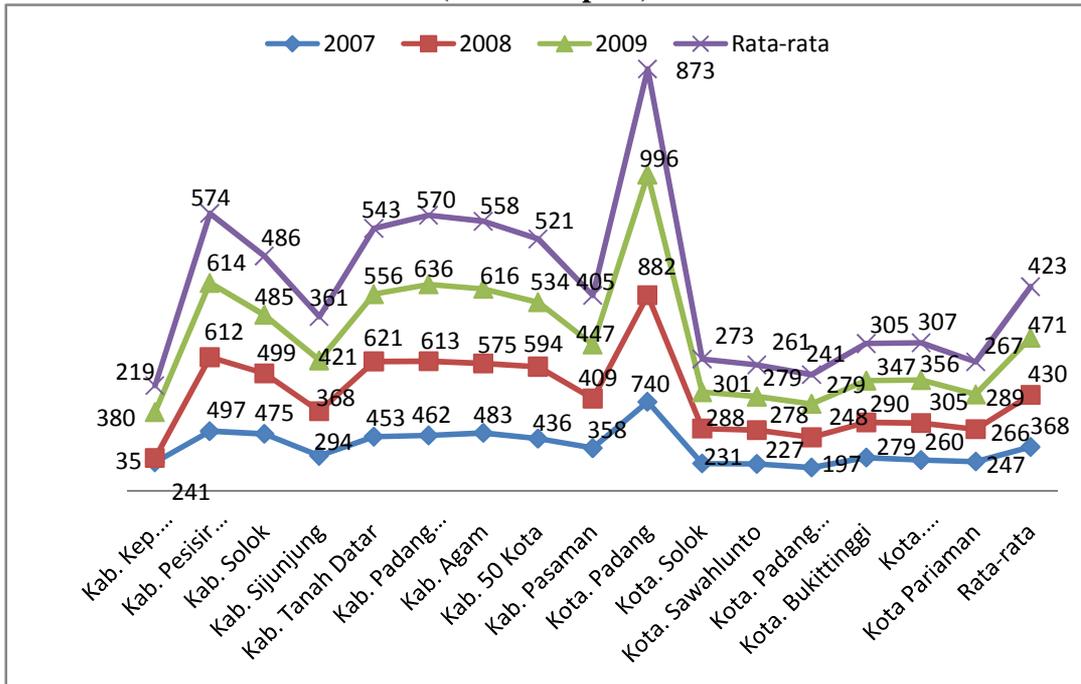
Hal yang menarik dari perkembangan PDRB Perkapita berdasarkan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2009, yang mana pada

tahun ini Propinsi Sumatera Barat terkena dampak bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,9 SR. Hampir seluruh daerah di Propinsi Sumatera Barat merasakan dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut, dari beberapa daerah yang paling parah efek yang ditimbulkan adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Namun dari perkembangan PDRB Perkapita pada tahun 2009 menunjukkan hasil yang stabil dan melihat peningkatan, apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan ekonomi daerah-daerah yang ada di Propinsi Sumatera Barat terus tumbuh dan berkembang dengan sektor perekonomiannya yang dominan pertanian seperti: perkebunan, peternakan dan perikanan. Sehingga efek yang ditimbulkan dari gempa bumi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian daerah-daerah di Propinsi Sumatera Barat maupun secara regional.

Peningkatan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan adanya sinergi dengan pemerintah daerah (lokal). Kebijakan dan atauran yang dibuat seyogyanya memiliki visi dan misi yang sama antar lembaga pemerintahan yang ada di pusat dengan daerah. Sehingga adanya daya tarik tersendiri diantara masing daerah-daerah dalam melihat peluang investor dalam berinvestasi atau menempatkan modalnya. Salah satu referensi atau ajuan dari beberapa investor dalam menempatkan modal di daerah adalah seberapa baik dan memadainya infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dalam menunjang kegiatan produksi.

Gambar 2
Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009
(Miliar Rupiah)



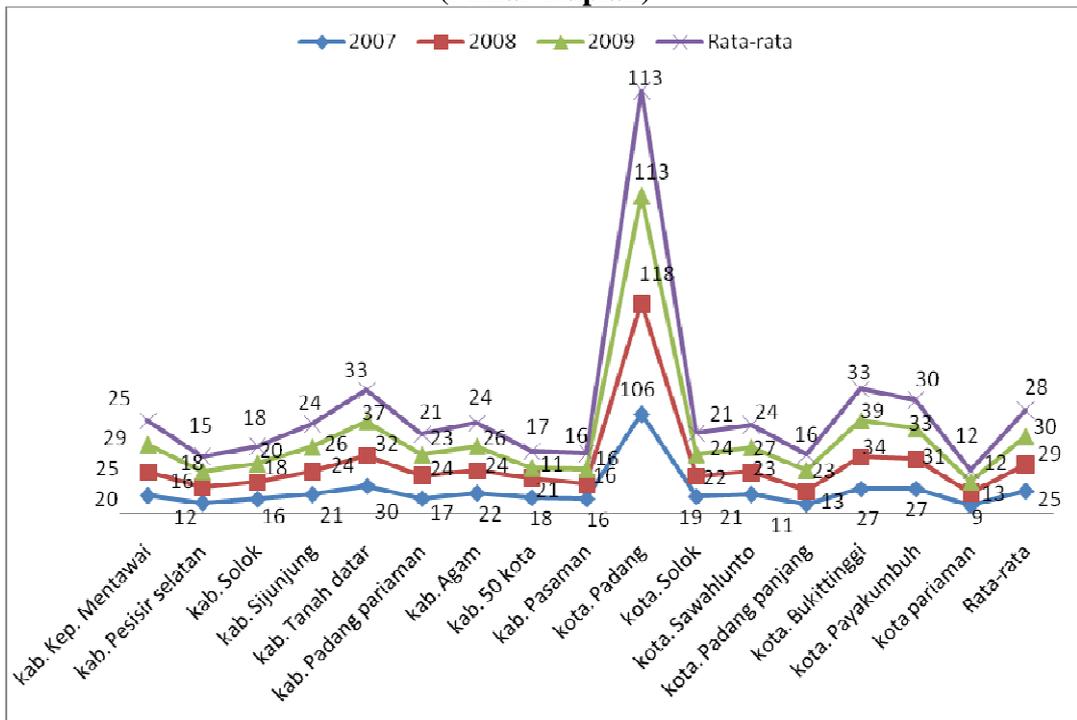
Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah tahun 2012)

Gambar 2 ini memperlihatkan seberapa besar belanja pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat. Belanja daerah merupakan salah satu ajuan yang menjadi keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang baik dan memadai pada era otda serta kebijakan desentralisasi fiskal, sehingga terciptanya tingkat kesejahteraan dan terus tumbuh dan berkembangnya ekonomi di masing-masing daerah.

Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki belanja daerah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang

Panjang memiliki belanja daerah yang terendah di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Gambar 3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009
(Miliar Rupiah)

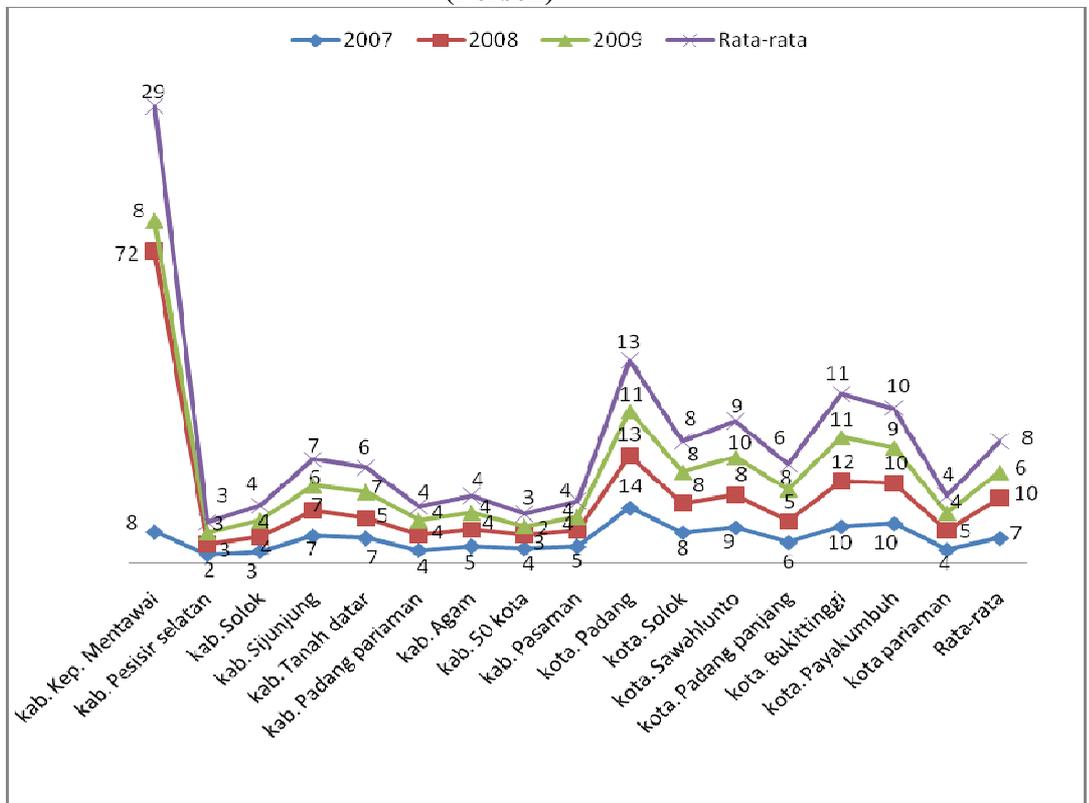


Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah tahun 2012)

Sedangkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terendah di ditempati oleh Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Kota Padang, Bukittinggi, dan Kabupaten Tanah Datar memiliki kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik di Sumatera Barat. Namun dalam era otda dan desentralisasi fiskal ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar belanja pemerintah daerah, akan tetapi bagaimana alokasi belanja tersebut memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kemudian seberapa besar kemandirian atau ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah dari dana perimbangan pusat. Kemandirian daerah dapat dilihat dari besar kecilnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi terhadap belanja pemerintah daerah, dan bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 4
Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat Terhadap Belanja Pemerintah Daerah
Tahun 2007-2009
(Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah tahun 2012)

Berdasarkan gambar 2, 3, dan 4 dapat dilihat dari perkembangan belanja pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2009. Perkembangan belanja pemerintah daerah di Sumatera Barat memperlihatkan peningkatan dari tahun 2007-2009 dengan rata-rata sebesar 422,78 miliar. Namun dari sisi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat memperlihatkan berfluktuatif dari tahun 2007-2009 dengan rata-rata pertahun Rp 28,00 miliar, hal ini akan berdampak pada perkembangan kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerahnya, kemudian dari sisi rasio PAD terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rata-rata pertahun 7,83 persen dari tahun 2007-2009. Dari perspektif ini dapat dilihat besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Hal yang menarik dicermati dari beberapa gambar diatas kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memiliki rasio kemandirian fiskal yang lebih baik dengan rata-rata pertahun sebesar 29 persen, sedangkan dari sisi belanja daerah rata-rata pertahun sebesar Rp 219 miliar, dan Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun sebesar Rp 25 miliar, masih menempati dibawah Kota Padang dengan belanja daerah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan rata-rata pertahun sebesar Rp 872,82 miliar. Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dari tahun 2007-2009 dengan rata-rata pertahun sebesar Rp 118,30 miliar. Apabila

dilihat dari kebutuhan belanja pemerintah daerah Kota Padang dengan peranan daerahnya sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan daerah lain, penyediaan infrastruktur yang baik dan memadai, salah satu kemungkinan besar tingginya belanja pemerintah daerah Kota Padang. Kemudian dari kemandirian dan ketergantungan fiskal Kota Padang terhadap dana perimbangan dari pusat agak lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Artinya kemandirian daerah Kota Padang dalam membiayai belanja daerahnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari rata-rata rasio PAD terhadap belanja daerah dari gambar 4 sebesar 13 persen pertahun.

Pada dasarnya desentralisasi fiskal mampu memperlihatkan kemandirian daerah dalam mengelola daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat dicapai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki rasio PAD terhadap belanja daerah yang terendah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Sumatera barat, artinya kemampuan dan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dari PAD sangat kecil, dan besarnya ketergantungan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007-2009 dengan rata-rata pertahun sebesar Rp 15 miliar, dengan rasio PAD terhadap Belanja daerah rata-rata 3 persen pertahun. Sedangkan belanja pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata pertahun sebesar Rp 574 miliar. Hal

yang menarik dari kondisi ini Kabupaten Pesisir Selatan memiliki belanja daerah nomor dua yang tertinggi setelah Kota Padang, namun memiliki kemampuan fiskal daerah yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Fenomena ini menggambarkan salah satu ajuan pemerintah pusat dalam mentransferkan dana perimbangan kemungkinan besar dilihat dari PDRB perkapita, jumlah Penduduk, geografis, dan kemampuan pendapatan asli daerah.

Dengan tingkat perbedaan yang demikian, di khawatirkan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang semula ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasikan perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu akan menghambat atau semakin besarnya ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah dari APBD terhadap dana perimbangan.

Berdasarkan kondisi di atas, di mana euforia desentralisasi fiskal terjadi begitu luas dan disisi lain kesejahteraan masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan ke arah perbaikan. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, sebagai bentuk pengalihan otoritas pengelolaan sektor fiskal daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melalui pengelolaan sumber-

sumber penerimaan yang di milikinya serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerahnya. Untuk memenuhi kebutuhan daerah, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Melalui sumber-sumber penerimaan daerah ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan rumuskan masalah tersebut yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimanakah pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimanakah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
5. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, modal manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
3. Untuk mengetahui pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
4. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?
5. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, modal manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat ?

D. Kegunaan dan manfaat penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk memperdalam kajian disiplin ilmu, khususnya ilmu ekonomi Pembangunan dibidang Ekonomi Publik.
 - b. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1), di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara di dunia sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi. Kuznets (dalam Jhingan 2004:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini memiliki tiga komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini

sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003:16), PDB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, pendapatan total yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua, adalah pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian.

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; tahapan masyarakat tradisional, penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan, tahapan tinggal landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal yang tinggi, Todaro dan Smith (2004:129). Untuk menuju tahap “tinggal landas” Rostow mensyaratkan adanya tabungan dan investasi 15-20 persen dari GNP-nya, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang menabung dari proporsi tersebut, Todaro dan Smith (2004:132).

Formula untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004:18), yaitu:

$$G_t = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100 \% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

G_t = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

Y_{rt} = Pendapatan perkapita pada tahun t

Y_{rt-1} = pendapatan per kapita pada tahun t-1

Todaro dan Smith (2004:92-96) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara yakni total nilai riil netto atas seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan datang.

b. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kemajuan teknologi tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu; pertama, teknologi yang bersifat netral. Kemajuan teknologi yang netral terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan ketiga, kemajuan teknologi hemat modal.

Di negara-negara dunia ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien, kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja.

Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003:175).

Dalam model Solow (Mankiw, 2003:176-179) output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan.

$$Y = F(K, L) \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan asumsi skala hasil konstan maka dengan membagi kedua sisi persamaan dengan L (pekerja) maka dapat juga di identifikasikan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu $Y/L = F(K/L, 1)$, dan selanjutnya dapat ditulis persamaan $y = f(k)$, yang menggambarkan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.

Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan utama yang mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*Steady state level of capital*), yaitu di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal (k) dan output $f(k)$ adalah tetap. Notasi yang umumnya digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah k^* , $\Delta k = 0$. Dalam Model Solow dasar ini juga ditunjukkan bagaimana akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya meski dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output, tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan, Mankiw (2003:194)

Dalam Mankiw (2003:194-196), Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output dan perekonomian suatu negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per pekerja, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan hal yang sama. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (*break event investment*), yaitu $\Delta k = i - (\delta + n) k$.

Satu hal yang penting di sini adalah bahwa meskipun dalam kondisi mapan, modal dan output per pekerja adalah tidak berubah atau konstan. Tetapi model ini bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi menurut Solow merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu.

Kemajuan teknologi ini direfleksikan dengan apa yang disebutnya sebagai efisien tenaga kerja, yaitu mencerminkan pengetahuan tenaga kerja tentang metode-metode produksi; ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat, Mankiw (2003:203).

Menurut Sumarsono (2003:5) tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran

berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu bekerja, dalam arti menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Dengan demikian, berdasarkan model Solow ini, secara bersama-sama pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi memiliki kontribusi penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Wibowo (2008:63) menyatakan bahwa dalam beberapa studi yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi perkapita, seperti yang dilakukan Barro (1996), Sachs dan Warner (1997); Sala-i-Martin (1997) Knight, Loayza, dan Villanueva (1993); Mankiw, Romer, dan Weil (1992), serta Levine dan Renelt (1992), terdapat beberapa variabel yang selalu terbukti mempunyai hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita, yaitu Rasio Investasi terhadap GDP, dan Human akumulasi modal manusia.

Disamping beberapa variabel ini, hasil studi Levine dan Renelt (1992) (dalam Wibowo 2008:64) juga menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan jumlah penduduk dan tenaga kerja (*population growth*) menentukan tingkat kemakmuran ekonomi. Disamping itu, Becker et al (1990) berpendapat bahwa dengan asumsi tingkat fertilitas sebagai *endogenous variable*, masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak akan cenderung untuk melakukan investasi lebih banyak di bidang SDM. Di sisi lain, daerah yang jarang penduduknya memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak guna mengisi kekosongan pasar tenaga kerja. Namun demikian, *net*

impact terhadap pencapaian kinerja ekonomi tidaklah mudah untuk ditentukan. Diungkapkan pula bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek *diminishing returns* atas penggunaan tanah dan sumber daya alam, Becker et al. 1999 dalam Wibowo (2008:64). Jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar dapat pula mendorong spesialisasi dan meningkatkan pengetahuan di bidang investasi. Dengan demikian, hubungan antara tenaga kerja dan pendapatan perkapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam.

Lebih jauh Vazquez dan McNab (2001:11) menjelaskan bahwa kebanyakan studi yang mempelajari hubungan langsung desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi menerapkan model pertumbuhan endogenous Barro (*Barro's Endogenous Growth Model*), bahwa model barro menyatakan terdiri dari berbagai input termasuk modal swasta, dan pengeluaran publik dalam tiga tingkatan pemerintah. Namun dalam beberapa studi yang lain, seperti Davoodi dan Zou (1998) yang dikutip oleh Vazquez dan McNab (2001:11) menggunakan variabel kondisi Levine-Renelt (*Levine-Renelt conditioning variables*) atau pertumbuhan Solow meliputi investasi, pertumbuhan penduduk, dan *human capital*, untuk menguji perubahan dari perkiraan untuk desentralisasi fiskal.

Sementara itu, porsi investasi dalam Regional GDP diharapkan akan positif karena secara empiris telah ditemukan bahwa investasi dibidang

infrastruktur dapat mempengaruhi tingkat produksi di beberapa daerah, Sturm 1998 (dalam Wibowo 2008:64).

Selanjutnya sebagaimana disepakati oleh para praktisi dan akademisi bahwa *human capital* atau kualitas sumber daya manusia terkait secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2008:64). Dengan demikian, variabel tersebut diharapkan pula akan menghasilkan angka positif dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan dari berbagai pendapat dan argument yang dikemukakan pada dasarnya investasi, modal manusia dan tenaga kerja merupakan faktor yang mendorong terjadinya perkembangan ekonomi suatu wilayah maupun suatu negara, dan diharapkan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat menghasilkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Desentralisasi Fiskal

Pada dasarnya desentralisasi merupakan suatu bentuk kewenangan yang besar dan penuh diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian yang besar dalam sumber-sumber keuangan yang diterima dan dihasilkan oleh suatu daerah, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta lebih demokratis.

Richard M. Bird (2000:4) menyatakan bahwa ada tiga variasi desentralisasi fiskal: 1) *desentralisasi* berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintahan daerah, 2) *delegasi* berhubungan dengan suatu situasi yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah, 3) *devolusi* (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis, Litvack (1999:2-3)

- a. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
- b. Desentralisasi administrasi merupakan redistribusi pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
- c. Desentralisasi fiskal menyangkut kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terciptakan penyelenggara pemerintah yang demokratisasi, transparan yang mampu melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerahnya.

Prinsip dasar dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menggunakan pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*.

Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat, sedangkan pendekatan *revenue assignment* yaitu memberikan peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan, artinya Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi, Joko Waluyo (2007:3-4).

Dalam membahas desentralisasi fiskal, umumnya terdapat tiga variabel yang sering digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal, yaitu (Khusaini, 2006 dalam Aan Zuliyanto 2010:25)

1. Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Selain itu Phillip dan Woller

(1997) menggunakan rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pertahanan dan tunjangan sosial). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

3. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total penerimaan pemerintah (Philips dan Woller, 1997). Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara penerimaan pemerintah daerah terhadap

penerimaan pemerintah pusat.

3. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam menemukan pola ideal yang merepresentasikan aspek keadilan, bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah namun juga antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ma (1996:29) melaporkan bahwa Indonesia pernah menerapkan praktik transfer fiskal yang tersentralisir terutama yang berkaitan dengan sistem perpajakan.

Sejak mengadopsi pola desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, perkembangan ke arah desain *intergovernmental fiscal* yang lebih terdesentralisir dinilai sangat lamban oleh sebagian kalangan. Hal ini diperkuat oleh Silver et al (dalam Wibowo, 2008:69) yang berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai kontrol yang cukup tinggi atas dana-dana yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat kala itu pemerintah pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan domestiknya.

Disamping itu terdapat anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memiliki kompetensi administrasi agar bisa lebih independen dalam masalah keuangan. Sebelum era baru desentralisasi fiskal digulirkan pada tahun 2001, setiap daerah tingkat I dan tingkat II memiliki dua jenis penerimaan guna membiayai pengeluaran mereka yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat (Alfirman 2003:7). Fitriani et al.

(2005:60) mengungkapkan bahwa menyusul lengsernya Presiden Soeharto, terdapat tekanan untuk mereformasi setiap kebijakan yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengungkapkan bahwa lengsernya kekuasaan Orde Baru, terdapat minat yang besar untuk mengetahui berbagai aspek KKN di Indonesia, seperti seberapa besar praktek KKN dan implikasinya terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin. Selain itu, juga terdapat minat untuk mengetahui apakah inisiatif anti KKN dan reformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik yang dimulai sejak tahun 1998 telah membuahkan hasil dengan menurunkan frekuensi KKN di Indonesia. Berbagai kajian mengenai pelaksanaan otonomi daerah juga telah memfokuskan perhatian tentang KKN dan tata kelola pemerintahan pada tingkat lokal. Mengenai hal ini, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa bersamaan dengan adanya desentralisasi dan otda, KKN juga akan didesentralisasikan dari tingkat pusat ke tingkat lokal. Hal itu adanya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar dalam pelaksanaan desentralisasi dan otda, Sumarto, dkk (2004:8).

Untuk itu, Presiden Habibie yang meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi (Fitriani et al. 2005:60). Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintahan Habibie meluncurkan dua produk hukum fenomenal yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut UU No 22/1999, seluruh kewenangan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom, kecuali lima jenis kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan ini meliputi: kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan agama, dan kebijakan lainnya. Sementara itu, kewenangan pemerintah propinsi meliputi seluruh kewenangan yang mengakut permasalahan antar kabupaten/kota, kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, dan segala kewenangan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, Sumarto (2004:19).

Kerangka desentralisasi fiskal yang baru telah memungkinkan pula adanya pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Fitriani et al. (2005) melaporkan bahwa sebelum tahun 2001, terdapat 336 kabupaten/kota di seluruh propinsi. Namun, jumlah ini meningkat tajam menjadi 434 daerah pada akhir tahun 2004. Boediono (2002) memaparkan bahwa mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, di bawah era baru desentralisasi fiskal, setiap daerah mempunyai sumber penerimaan yang beragam. Pertama, sebagaimana dalam skema sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk memungut penerimaan pajak dan retribusi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Pemda diperkenankan menyusun instrument pendapatan daerah setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Kedua, Pemda Tk. I dan II mendapatkan

dana perimbangan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang pendistribusiannya lebih banyak diperuntukkan pemerintah daerah yaitu sebanyak 90 persen. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004, proporsi bagi hasil pendapatan baik pajak maupun sumber daya alam mulai menunjukkan pola yang lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah. Reformasi hubungan fiskal antar pemerintah tersebut ditandai pula dengan pengenalan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan penyaluran dana pemerintah pusat yang bersifat *lump-sum* dimana formulanya berdasarkan beberapa variabel antara lain jumlah penduduk, luas daerah, dan kemampuan fiskal daerah yang bersangkutan.

Dana ini disalurkan dalam rangka mengurangi ketimpangan antar propinsi dan antar kabupaten/kota. Sementara DAK merupakan transfer dana yang bersifat khusus untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka komitmen nasional dan hanya dibagikan kepada Pemda Tk. II.

Namun Sumarto, dkk (2004:21) memberikan pandangannya dalam sebuah penelitiannya tentang tata kelola pemerintahan di era otonomi daerah. Dimana pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang cukup luas di mulai dari tahun 2001, nampaknya memunculkan kembali distorsi pasar.

a. Otonomi daerah dan pungutan daerah

Otonomi daerah hampir selalu dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah, karena hal itu dianggap sebagai faktor utama yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. PAD yang relatif kecil dibanding dengan kebutuhan riil daerah (APBD) telah membawa pengertian yang bias terhadap kebijakan otonomi daerah. Sebagian besar aparat pemerintah daerah mempersepsikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menghendaki adanya kemampuan keuangan daerah (PAD) yang makin besar.

Bahkan secara ekstrim ada yang menyatakan bahwa dengan otonomi daerah berarti semua kebutuhan belanja daerah harus mampu dibiayai oleh sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Konsekuensinya, salah satu agenda penting Pemda dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan membuat Perda pungutan baru dalam rangka meningkatkan PAD setinggi mungkin.

b. Otonomi daerah dan proteksi ekonomi lokal

Selain maraknya (kembali) berbagai pungutan daerah, pelaksanaan otonomi daerah juga telah membawa gejala untuk kembali menerapkan rezim perekonomian yang bersifat proteksionis.

c. Pungutan di sepanjang jalur transportasi

Salah satu contoh disini, komoditi hasil pertanian yang melimpah dari Kabupaten Karo di Propinsi Sumatera Utara sebagian besar

merupakan komoditi yang cepat busuk/hancur. Karena itu, sangatlah penting untuk memperoleh distribusi yang lancar dan cepat untuk barang-barang ini, agar dapat mempertahankan kualitas maupun harga jual di tingkat konsumen. Para petani dan pedagang akan melakukan segala cara untuk mempercepat pengiriman komoditinya ke pembeli, meskipun mereka harus membayar berbagai jenis pajak dan pungutan selama perjalanan. Pungutan-pungutan tambahan ini akan menambah biaya distribusi, dan pada akhirnya akan menyebabkan harga komoditi menjadi lebih mahal pada tingkat konsumen. Jumlah pungutan ditentukan dengan mengukur berat truk di beberapa stasiun penimbangan sepanjang perjalanan.

d. Beban pungutan terhadap komoditi pertanian

Berhubungan dengan pemerintah daerah tidak mendapat penerimaan langsung dari sektor perkebunan, maka Pemda menjadikan sektor perkebunan sebagai target berbagai jenis pungutan seperti: pungutan tingkat produksi, tingkat distribusi dan penjualan produk.

e. Preman terorganisir

Ketidak mampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pungutan liar di jalan yang dilakukan oleh preman maupun oknum polisi.

f. Kepentingan birokrat di atas kepentingan kaum miskin.

Secara konseptual, kebijakan publik yang hendak dijalankan oleh pemerintah daerah dalam perbaikan kesejahteraan rakyat kelompok bawah, salah satu contoh pengembangan SDM melalui pendidikan dan kesehatan serta perbaikan kondisi perekonomian masyarakat melalui "ekonomi kerakyatan," suatu konsep yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah. Namun dalam prakteknya tujuan ideal tersebut tidak diupayakan secara nyata, dan hal ini tercermin dalam alokasi anggaran yang masih lebih mengedepankan kepentingan para birokrat.

g. Otonomi daerah dan DPRD

Otonomi daerah menjadi tanggung jawab rakyat, hak rakyat untuk mengatur sistem pemerintahannya. Oleh karena itu rakyat menempatkan wakil-wakilnya dalam institusi pemerintahan, buruknya dalam pengkaderan dalam partai politik mengakibatkan kader-kader yang duduk di DPRD menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi kelompok dan golongan semata.

4. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995), dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998:5-14) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien

seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena:

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.
- b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Bahn dan Linn dalam Wibowo (2008:56) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan ini didukung oleh dua argument sebagai berikut. Pertama, *median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiscal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Oates (1993) yang dikutip oleh Wibowo (2008:56) menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung dengan penduduk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari desentralisasi fiskal adalah munculnya kompetisi atau persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahannya, Davoodi dan Zou (dalam Wibowo, 2008:56). Sejalan dengan itu Oates, (dalam Wibowo, 2008:56) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga dikembangkan oleh Prud'Homme (1995:29) yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah di masa datang.

Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebut Hukum Wagner (dalam Mangkusobroto, 1993:171) mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga di dasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, industri dan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks.

Dalam hal ini Wanger menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Hukum Wanger dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PP_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n} \dots \dots \dots (3)$$

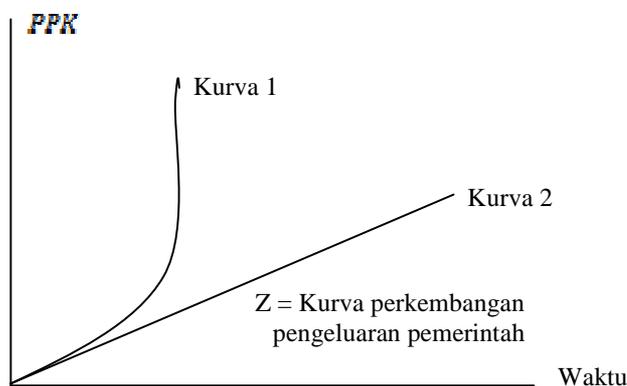
Keterangan:

P_kPP = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...,n = Jangka waktu (tahun)

Hukum Wanger ini ditunjukkan dalam diagram berikut di mana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2



Gambar 5
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wanger

Sumber : Guritno Mangkoesobroto, (1993:172)

Lebih jauh Thiessen (2003:6-7), mendasari pendapatnya tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, dengan **Empat** hal yang menjadi argumentasi dasar mengenai manfaat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai argumentasi tersebut dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, berlakunya Hipotesis Diversifikasi atau *diversification hypothesis*. Argumen ini menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa

publik secara seragam untuk setiap daerah adalah tidak efisien (Oates, 1977). Hal ini karena tingkat keuntungan marjinal dari pelayanan publik berbeda serta adanya ketidaksamaan waktu (periode) atas permintaan terhadap barang dan jasa publik lokal di masing-masing daerah, dengan desentralisasi, sumber daya dapat disimpan dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing daerah dan digunakan pada waktu yang tepat sehingga mendorong terjadinya efisiensi.

Selain itu pengeluaran dibidang infrastruktur dan sosial yang merespon perbedaan lokal dan regional seperti halnya lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat yang kemungkinan mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut. *Effect* langsungnya terindikasi pada keunggulan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengeluaran publik yang lebih efisien, sehingga pembayar pajak akan memperoleh kepuasan yang lebih baik. Dengan demikian untuk jumlah pengeluaran yang sama, pemerintah daerah akan menghasilkan kepuasan atau kesejahteraan individu yang lebih baik dibandingkan dengan pengeluaran tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini dikenal sebagai efisiensi konsumen atau *consumer/allocative efficiency* (Vazquez dan McNab, 2001:11).

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko, 1996: 47-48)

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Penyediaan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Secara umum yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah total pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin, biasanya pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang berbagai macam subsidi (subsidi daerah). Angsuran bunga hutang pemerintah serta pengeluaran lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan, pengeluaran ini bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek seperti: jalan raya, jembatan, sekolah, pendidikan dan lain-lain. Dumairy (1996:45)

Selanjutnya, adanya diversifikasi berpotensi memberikan keuntungan kesejahteraan relatif lebih besar karena berlakunya elastisitas harga negatif terhadap permintaan barang publik, dan studi empiris menemukan bahwa permintaan ini harga sangat inelastis. Oleh karena itu, efisiensi 'Pareto' dapat ditingkatkan melalui desentralisasi fiskal. Menurut model ini, semakin

beragam tuntutan masyarakat atas penyediaan barang publik, maka semakin besar manfaat desentralisasi. Untuk itu belanja pemerintah daerah perlu dibedakan menurut selera dan keadaan setempat. Selain itu, adanya mobilitas penduduk menciptakan insentif bagi individu untuk pindah ke komunitas yang dianggap menyediakan kombinasi terbaik antara pelayanan publik lokal dengan tingkat pajak. Perilaku ini akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

Kedua, argumen yang mendorong desentralisasi fiskal adalah hipotesis Pengekangan Leviathan atau *Leviathan restraint hypothesis*: Brennan dan Buchanan, 1980 (dalam Thiessen 2003:7) berpendapat bahwa pemerintah cenderung berorientasi untuk mengupayakan tingkat pendapatan yang tinggi hingga berpotensi merugikan para pembayar pajak. Adanya persaingan secara horizontal dan vertikal di antara tingkat pemerintahan yang berbeda dapat mencegah timbulnya perilaku memaksimalkan pendapatan tersebut. Pemerintah akan berkonsentrasi pada persaingan selain maksimisasi pendapatan seperti mempertahankan atau bahkan menurunkan tarif pajak, menyediakan berbagai kemudahan/bantuan bagi kegiatan bisnis, serta melakukan efisien dalam memproduksi barang dan jasa publik, seraya tetap mempertahankan tingkat pendapatan tertentu. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal membatasi jumlah anggaran mereka dan dengan demikian membatasi pengeluaran atas keseluruhan sektor publik. Kondisi ini mungkin mencegah kelebihan pasokan barang dan jasa publik dan atau

timbulnya inefisiensi di sektor publik. Jadi, desentralisasi fiskal memiliki dampak positif pada pertumbuhan Perkapita karena penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Ketiga, argumen mendukung pandangan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Hipotesis Peningkatan Produktivitas (*productivity enhancement hypothesis*). Desentralisasi fiskal menyiratkan pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini dapat memberikan insentif bagi mereka untuk tidak hanya mempertimbangkan preferensi penduduk lokal tetapi untuk secara aktif mencari inovasi dalam memproduksi dan menyediakan barang dan jasa publik. Selain itu persaingan antar daerah juga memacu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dengan biaya yang minimum, dan mendorong terjadi efisiensi produksi.

Artinya penyediaan jasa atau infrastruktur dalam jumlah yang sama dapat dilakukan pada biaya yang lebih murah, atau anggaran tertentu akan menghasilkan penyediaan layanan atau infrastruktur dalam jumlah yang lebih banyak ataupun kualitas yang lebih baik. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi produksi atau *producer efficiency* yang lebih besar, Vazquez dan McNab, (2001:11).

Hal senada juga di ungkapkan oleh Andrés Rodríguez-Pose,dkk (2007:6-7) Desentralisasi dapat mempengaruhi efisiensi pemerintah dalam dua cara. Pertama, transfer tertentu seperti sumber daya dan pengeluaran ke

tingkat subnasional (daerah) memungkinkan pengeluaran publik untuk dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih tepat, sehingga meningkatkan alokasi yang efisien atau disebut *producer efficiency* (Martínez-Vázquez dan McNab 2003). Kedua, desentralisasi dapat menciptakan kompetisi antara pemerintah daerah dan mendorong mereka untuk bersaing dalam meningkatkan dan menghasilkan barang dan jasa publik yang lebih efisien (*producer efficiency*) (Prud'homme, 1995; Donahue, 1997; Martínez-Vázquez dan McNab 2003)

Selain itu, desentralisasi fiskal meringankan pemerintah pusat dari urusan yang terlalu banyak, sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi produksi terhadap barang dan jasa publik yang masih menjadi tanggung jawabnya, yaitu barang dan jasa yang mencakup kepentingan masyarakat sangat luas dan secara substansial memiliki skala ekonomi dalam produksinya.

Keempat, terdapat beberapa argumen politik, seperti desentralisasi akan mengurangi konsentrasi kekuasaan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan (*vested interest*) atas kebijakan publik, mendorong demokrasi, pembangunan, dan jangka panjang memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, penelitian terbaru Wibowo (2008) serta Zulianto (2010) menemukan bukti yang cukup untuk menjelaskan hubungan positif pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Thiessen

(2003) berpendapat bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berhubungan linear, dan Thiessen menggunakan bentuk fungsi kuadratik, yaitu $y = \alpha A + \beta A^2$. Hubungan akan berbentuk hump-shaped jika koefisien α positif dan β negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hump-shaped terbukti terjadi pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pada saat derajat desentralisasi masih rendah, maka terdapat hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi negatif.

Mendukung kesimpulan Thiessen, Akai, dkk (2007) yang meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 50 negara bagian USA periode 1992-1997 mendapatkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat hump-shaped. Pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, maka peningkatan desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu pada indikator penerimaan maupun indikator pengeluaran. Namun ketika desentralisasi fiskal sudah optimal, peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Pada dasarnya temuan penelitian yang sejenis merupakan suatu ajuan atau panduan dalam sebuah karya tulis ilmiah, hal ini merupakan dasar bagi peneliti untuk bisa melihat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang menjadi kajian dalam karya tulis yang bakal di angkat.

Dalam temuan penelitian sejenis ini penulis dapat memperkaya wawasan dan pemahaman penulis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penulis lebih mampu memetakan indikator-indikator maupun proxy yang digunakan dalam melihat masing-masing variabel, baik variabel dependen (terikat) maupun variabel independen (bebas).

Kemudian penulis dapat mengklasifikasikan variabel-variabel kontrol dari temuan penelitian yang sejenis dan dijadikan salah satu indikator dalam penelitian yang akan penulis masukan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Sebagaimana penulis gambarkan atau sajikan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Study	Set Data	Variabel Devenden	Indikator Desentralisasi	Variabel Kontrol	Hasil Penelitian
Aan Zulianto (2010)	9 kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu tahun 2003-2008	Laju pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten/kota (%)	Pengeluaran dari ratio total belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat	Level awal pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, rasio investasi terhadap PDRB, modal manusia,	Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat <i>hump-shaped</i> . Pada saat derajat desentralisasi fiskal masih rendah, maka desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya apabila derajat desentralisasi fiskal sudah optimal, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif
Goerge W. Hammond (2009)	2.443 daerah non-metropolitan dan 629 daerah metropolitan di USA	Laju pertumbuhan PDB (%)	Ratio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat.	Tingkat pengangguran, tenaga kerja, tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, infrastruktur publik.	Dalam jangka panjang hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif pada daerah metropolitan, sedangkan daerah non-metropolitan berhubungan negatif.
Wibowo (2008)	29 propinsi di Indonesia tahun 1999-2004	Tingkat pertumbuhan PDB (%)	Pendapatan daerah kotor. Pendapatan daerah netto. Pengeluaran tingkat kab/kota. Pengeluaran tingkat propinsi.	Level awal GDP dan modal manusia.	Pendapatan daerah kotor dan netto mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Akai (2007)	50 Negara bagian USA tahun 1992-1998	Rata-rata tingkat PDB perkapita	Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat. Rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat.	Jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jumlah kursi demokrat di legeslatif, GINI, keterbukaan.	Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat <i>hump-shaped</i> . Pada saat derajat desentralisasi fiskal masih rendah, maka desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya apabila derajat desentralisasi fiskal sudah optimal, akan menyebabkan

					pertumbuhan ekonomi negatif.
Limi, Atsushi (2005)	51 negara maju dan negara berkembang tahun 1997-2001	Rata-rata PDB riil perkapita	Rasio pengeluaran pemda terhadap pengeluaran pemerintah pusat	Political freedom, tingkat pertumbuhan penduduk, modal manusia, level awal pertumbuhan PDB	Desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Thiesen (2003)	Negara-negara OECD tahun 1973-1998	PDB perkapita	Pendapatan yang diukur dari porsi pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah, terhadap total pendapatan pajak. Rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat	Level awal pertumbuhan PDB, rasio investasi terhadap PDB, modal manusia, pertumbuhan penduduk, dan depresiasi.	Pola hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan yaitu pada saat derajat desentralisasi masih rendah terhadap hubungan positif dan signifikan, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi negatif dan signifikan.
Xie et all (1999)	Negara USA tahun 1948-1994	PDB perkapita dan tingkat pertumbuhan	Rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat	Angkatan kerja, investasi, harga energi, keterbukaan, inflasi, dan GINI	Belanja pemerintah daerah berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Woller dan Philips (1998)	23 negara-negara LDC tahun 1974-1991	Tingkat pertumbuhan PDB perkapita	Rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat.	Level awal GDP, rasio investasi terhadap GDP, modal manusia, dan pertumbuhan penduduk.	Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Zhang dan Zhou (1998)	28 propinsi di China tahun 1980-1992	Tingkat pertumbuhan GDP riil	Rasio pengeluaran pemerintah propinsi terhadap total pengeluaran	Tenaga kerja, inflasi, keterbukaan, dan investasi	Hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

			pemerintah pusat		
--	--	--	------------------	--	--

Berdasarkan tabel 1, dari beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penulis dalam memilih variabel dan indikator yang digunakan dalam melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dengan variabel dan indikator yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang sesuai dengan kajian penulis. Dimana penulis menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen, dengan kata lain satu variabel yang penulis sebut sebagai variabel penjelas yaitu desentralisasi fiskal dan tiga variabel kontrol atau variabel yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yaitu investasi, modal manusia dan tenaga kerja sebagaimana yang digunakan oleh peneliti terdahulu.

Pertama, variabel dependen (terikat) yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, untuk melihat pertumbuhan ekonomi indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah PDRB perkapita harga konstan. Hal ini sesuai dengan indikator yang digunakan oleh Thiesen (2003), dan Xie et all (1999), namun perbedaannya disini terletak pada konteks cangkupan yang agak luas, dimana peneliti sebelumnya melihat dari ruang lingkup propinsi sedangkan penulis terbatas pada ruang lingkup kabupaten/kota.

Kedua, variabel independen (bebas) yang digunakan adalah desentralisasi fiskal, indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintahan daerah kabupaten/kota, namun penelitian sebelumnya lebih cenderung menggunakan rasio belanja pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap total belanja pemerintah pusat. Karena penulis

melihat indikator yang digunakan oleh peneliti sebelumnya tidak relevan digunakan dalam konteks struktur ekonomi di Sumatera Barat, dimana Pendapatan Asli Daerah lebih mewakili dan mampu menggambarkan kemandirian dan tidak kemandirian suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya masing-masing.

Ketiga, variabel independen (bebas) atau variabel kontrol yang digunakan adalah investasi, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kredit investasi ditambah dengan modal kerja yang diberikan oleh bank umum terhadap PDRB harga konstan. Secara umum indikator yang digunakan sama dengan peneliti sebelumnya yaitu Aan Zulianto (2010), Thiesen (2003), Xie et al (1999), Woller (1998) dan Zhang Zhou (1998), namun kemungkinan terletak pada proxy yang digunakan antara peneliti sebelumnya dengan penulis.

Keempat, variabel independen (bebas) atau variabel kontrol yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang telah berkerja selama seminggu yang lalu dengan berpendidikan SMA keatas. Hal ini sesuai dengan indikator yang digunakan oleh Goerge W. Hammond (2009), Wibowo (2008), Akai (2007), Limi Atsushi (2005), Thiesen (2003), Woller dan Philips (1998)

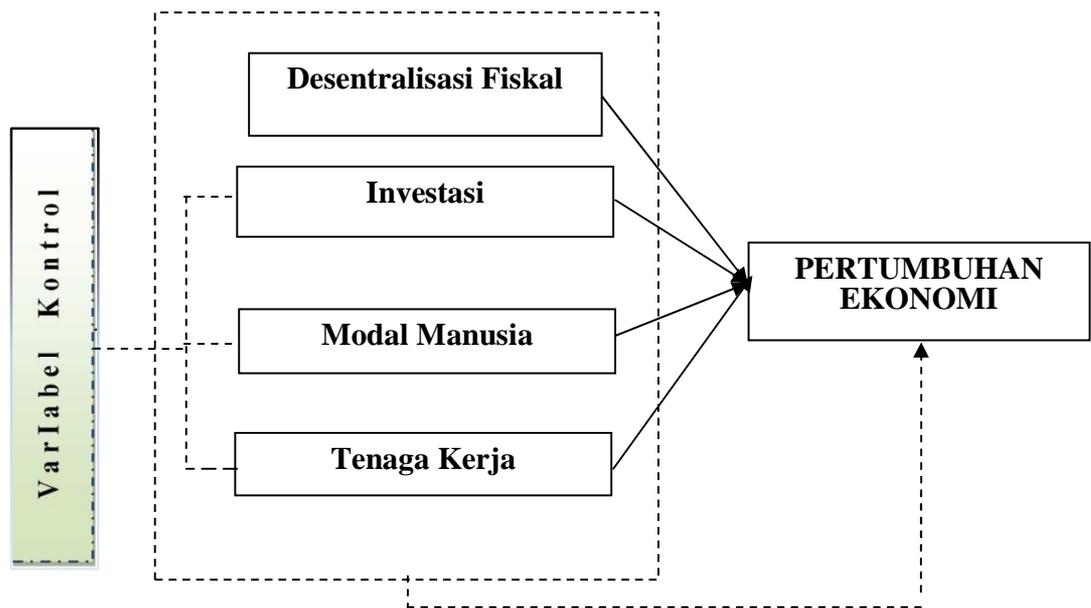
Kelima, variabel independen (bebas) atau variabel kontrol yang digunakan adalah jumlah seluruh penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang telah berkerja selama seminggu yang lalu. Hal ini sesuai dengan indikator yang digunakan oleh Goerge W. Hammond (2009), Xie (1999), Zhang Zhou (1998).

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori pertumbuhan model Solow dan hasil empiris yang ditemukan dalam studi-studi desentralisasi fiskal sebelumnya, maka studi tentang desentralisasi fiskal ini akan memasukkan tiga variabel utama yang akan dijadikan sebagai variabel kontrol, yaitu; Investasi, modal manusia (*Human Capital*), dan tenaga kerja. Penggunaan variabel kontrol ini mengadopsi penelitian Aan Zulianto tahun (2010), Akai (2007), Thessen (2003) dan juga mengaju pada peneliti sebelumnya. Dalam model pertumbuhan Solow sesungguhnya kemajuan teknologi juga menjadi determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Namun dalam studi ini, variabel tersebut tidak dapat dimasukkan karena keterbatasan data yang mengungkapkan secara tegas tentang ukuran kemajuan teknologi di suatu negara/daerah. Sebagai gantinya, studi ini mengambil variabel yang selalu digunakan oleh studi terdahulu yaitu variabel modal manusia. Sebagai proxy atas kualitas sumber daya manusia digunakan rasio penyelesaian pendidikan menengah (SMA) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah berkerja seminggu yang lalu. Rasio ini cukup populer digunakan mengingat usia 15 tahun merupakan usia dimulainya kerja, sehingga cukup tepat menggambarkan kualitas SDM di negara-negara berkembang, Woller dan Phillips 1998 dalam Wibowo (2008:64).

Secara sistematis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6
kerangka konseptual
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
di Propinsi Sumatera Barat

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel. Maka hipotesis penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

1. Variabel desentralisasi fiskal (DF) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Variabel investasi (INV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Variabel modal manusia (HC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Variabel tenaga kerja (TK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Variabel desentralisasi fiskal (DF) serta variabel kontrol yang terdiri dari: investasi (INV), modal manusia (HC) dan tenaga kerja (TK), secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: desentralisasi fiskal sebagai variabel penjelas dan variabel Kontrol antara lain investasi, modal manusia dan tenaga kerja terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan selama tahun 2007-2009 di era desentralisasi fiskal gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, kemungkinan lemahnya kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang berasal dari transfer pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan dan ketidak mandirian fiskal amat besar dalam konteks membiayai belanja langsung di Propinsi Sumatera Barat. Perlunya pengkajian ulang yang jelas dalam kedudukan daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan dan penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Besarnya belanja daerah yang diambil dari APBD tidak mencerminkan

membbaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

2. Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Artinya apabila investasi mengalami peningkatan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ikut mengalami peningkatan.
3. Modal manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Artinya semakin banyak sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dilihat dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas dengan tingkat pendidikan minimal SMA keatas dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.
4. Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Artinya peran serta tenaga kerja memiliki peran penting dalam suatu perekonomian baik menghasilkan maupun menciptakan suatu barang dan jasa, sehingga manfaat yang ditimbulkan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.
5. Desentralisasi fiskal, investasi, modal manusia, tenaga kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal, investasi, modal manusia

dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan maupun belanja daerah, dimana sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pajak dan retribusi harus mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah di daerah, namun adanya perhatian yang besar dan khusus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan Perda tentang pajak dan retribusi, sehingga tidak merusak pada tataran ekonomi di daerah, dengan menciptakan *good governance* dan efisiensi anggaran, dan menerapkan anggaran yang pro kepada rakyat serta melibatkan masyarakat dalam perumusan program dan pelaksanaannya. Hal ini dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang memadai, kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi secara tersendiri akan meningkat.
2. Apabila dilihat dari sisi investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat, dimana kontribusi yang disumbangkan dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi sangat kecil

hanya sebesar 0,002 persen. Hal ini diharapkan pemerintahan di daerah Propinsi Sumatera Barat, mampu memberikan suatu kondisi yang meyakinkan investor dalam berinvestasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai, serta mengembangkan investasi tidak hanya di dominasi di sektor pertanian akan tetapi ke sektor jasa dan perdagangan.

3. Pada dasarnya kualitas modal manusia yang baik di suatu daerah merupakan representasi kemajuan ekonomi suatu daerah, namun dalam konteks modal manusia di Sumatera Barat hanya memberikan pengaruh sebesar 0,008 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pemerintahan di daerah Propinsi Sumatera Barat, bisa menghasilkan atau menyediakan suatu kebijakan yang mampu mengakomodasi potensi sumber daya manusia yang ada dengan menyediakan sumber perkerjaan yang lebih heterogen dan kemampuan jaminan hidup yang layak dan lebih baik.
4. Tenaga kerja memiliki pengaruh yang agak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat sebesar 0,152 persen. Diharapkan pemerintah daerah lebih bisa memberikan suatu kebijakan perlindungan dan tingkat kesejahteraan yang baik bagi tenaga kerja serta adanya jaminan sosial yang diperoleh setelah tidak berkerja ataupun tidak mampu untuk berkerja kembali.
5. Melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya indikator yang digunakan dalam penelitian ini masih

terbatas pada sisi pengeluaran pemerintah yaitu antara belanja pusat dengan belanja daerah dan variabel kontrol yang digunakan seperti investasi, modal manusia dan tenaga kerja masih berada pada ruang lingkup yang terbatas. Disarankan kepada penelitian selanjutnya dalam melihat pengaruh desentralisasi fiskal menggunakan indikator yang berbeda, sehingga efek dan manfaat dari kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif pada bidang-bidang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Ajija, R. Shochrul, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat
- Akai, Nobuo, dkk, 2007. "Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, Economics of Governance." Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8, Iss. 4; p. 339.
- Ananda, Candra Fajri, 2002. "Problems Of The Implementation Of Fiscal Decentralization In Regional Autonomy: The Case Of Malang Municipality And Trenggalek District" *Jurnal Faculty of Economics Brawijaya University*; Juli 2002
- Andrés Rodríguez-Pose, dkk, 2007. "Fiscal decentralisation, efficiency, and growth." working papers series in Economics and Social Sciences, April 2007.
- _____.2002. "On The Measurement And Impact Of Fiscal Decentralization." *Jurnal World Bank Institute*.
<http://www.worldbank.org>
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Alfirman, L., 2003. *Estimating Stochastic Frontier Tax Potential : can Indonesian local governments increase tax revenues under decentralization?*, Working Paper No. 03-19, Department of Economic, University of Colorado at Bolder, Colorado.
- Badan Pusat Statistik. *Sumbar dalam Angka 2007*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
_____. *Sumbar dalam Angka 2008*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
_____. *Sumbar dalam Angka 2009*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
_____. *Sumbar dalam Angka 2010*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
_____. *Sumbar dalam Angka 2011*. Propinsi Sumatera Barat : BPS
- Boediono, 2002. Kebijakan Pengelolaan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiscal, bahan pidato disajikan pada rapat koordinasi di Jakarta, 11 Februari 2002.